

PENGALIHAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU - PENGALIHAN

2009

PERBUP PEMALANG NO. 13 BD. 2009/ NO. 13

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan penataan pengelolaan pelayanan perijinan terpadu, pelayanan perijinan terpadu yang saat ini ditangani oleh Unit Pelayanan Perijinan dan Investasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dialihkan pengelolaannya kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008, Perda Kabupaten Pemalang No. 21 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Terpadu Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, Diatur pula tentang Pengalihan Pengelolaan, dan Ketentuan Lain-Lain.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 Februari 2009
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri atas 4 Halaman.